

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah negara dengan sistem demokrasi membutuhkan sebuah organisasi politik yang menjadi instrument demokrasi. Organisasi tersebut biasa disebut partai politik. Secara definitive, Carl J. Friedrich mendefinisikan partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisir untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan, dengan maksud mensejahterakan anggotanya, baik untuk kebijaksanaan, keadilan, maupun untuk hal-hal yang bersifat materiil.¹ Sementara itu, R. H. Soltau mengemukakan definisinya tentang partai politik sebagai kelompok warga negara terorganisasi dan bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, dengan tujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat.²

Terbentuknya partai politik mengarah pada adanya pemilihan umum. Di dalam studi politik, pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga politik praktis yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan.³ Pemilihan Umum di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dari periode pemilu ke

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1977, hlm.161.

² R.H Soltau, *Pengantar Ilmu Politik: an introduction to politics*, Jakarta: Leonita, 1967, hlm. 43.

³ Syamsuddin Haris, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru, Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan obor Indonesia dan PPW-LIPI, 1998, hlm. 7.

periode pemilu yang lain. Selama pemilu Orde Baru, kita mengenal sistem pemilu proporsional dengan daftar tertutup. Keterpilihan calon legislatif bukan ditentukan pemilih, melainkan menjadi kewenangan elite partai politik sesuai dengan susunan daftar caleg beserta nomor urut. Dalam sistem demikian, kedudukan parpol menjadi sangat kuat terhadap kadernya di parlemen. Namun di satu sisi, basis sosial dan relasi politik para wakil rakyat dengan konstituen menjadi lemah.

Tahun 1973 Presiden Soeharto melakukan kebijakan fusi partai politik⁴. Penyederhanaan partai politik ini berimbas pada kekuatan Golkar dalam merebut suara pada pemilu-pemilu berikutnya. Terbukti pada lima kali Pemilu, Golkar merupakan pemenang tunggal dalam kepartaian di Indonesia saat itu. Keadaan ini membuat kekuasaan eksekutif dan legislatif ada di tangan Golkar. Sejarah berlanjut, rezim Orde Baru akhirnya tumbang setelah kekuatan mahasiswa dan rakyat dari berbagai elemen pasca pemilu 1997 turun kejalan menyuarakan pergantian pemimpin nasional. Rakyat sudah tidak puas dengan hasil pemilu 1997 ditambah lagi krisis ekonomi yang melanda Indonesia yang semakin mencapai

⁴ Dalam rangka menciptakan stabilitas politik pada masa orde Baru pemerintah menyusun rencana fusi partai dengan cara menyederhakan jumlah partai politik. Setelah pemilu 1971 tepatnya pada tahun 1973, maka dilakukan penyederhanaan jumlah partai politik tetapi bukan berarti menghapuskan partai politik tertentu, melainkan penggabungan (fusi) partai politik. Sehingga pelaksanaan kepartaian tidak lagi didasarkan pada ideologi tetapi pada persamaan program. Penggabungan tersebut menghasilkan tiga kekuatan social-politik, yaitu: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan fusi dari NU, Parmusi, PSII, dan Partai Islam Perti yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 1973 (kelompok partai politik Islam). Partai Demokrasi Indonesia (PDI), merupakan fusi dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo (kelompok partai politik yang bersifat nasionalis), yang terakhir adalah Golongan Karya. Lihat Leo Suryadinata, *Golkar dan Militer: Studi tentang Budaya Politik*, Jakarta: LP3S, 1992, hlm. 56.

titik puncaknya. Atas desakan rakyat dan mahasiswa akhirnya pada tahun 1998 Soeharto berhasil diturunkan.⁵

Posisi Presiden Soeharto segera diganti oleh B.J Habibie yang saat itu menjabat sebagai wakil Presiden Republik Indonesia. Presiden B.J Habibie yang barusaja dilantik langsung memenuhi tuntutan rakyat dan kelompok pro-demokrasi untuk mengadakan Pemilu demokratis pertama era reformasi 1999. Reformasi 1998 berdampak pada terbukanya kesempatan untuk melakukan kegiatan politik yang memunculkan partai politik dalam jumlah besar. Setelah sekian lama tidak ada kebebasan untuk berpolitik khususnya mengembangkan partai politik, maka sangat wajar bila pada awal reformasi ada demikian banyak orang yang membuat wadah pengorganisasian kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi.⁶

Hilangnya partai berbasis Kristen di era Orde Baru karena fusi yang diberlakukan Presiden Soeharto membuat Partai berbasis kristen tidak banyak dikenal masyarakat, padahal di era Orde Lama partai berbasis Kristen yang dikenal dengan nama Partai Kristen Indonesia sangat berperan besar didunia pemerintahan terbukti dengan hasil yang dicapai pada Pemilu 1955 dan Pemilu 1972 berhasil mendapatkan kursi di DPR. Munculnya partai berbasis Kristen ini disebabkan parahnya pendidikan dan muatan politik dari perspektif Kristen pada awal kemerdekaan seperti yang dikatakan T.B Simatupang:

⁵ Sutradara Ginting, *Jalan Terjal Menuju Demokrasi*, Jakarta: IPCOS. 2006, hlm. 7.

⁶ *Ibid.*, hlm. 27.

“Ketika orang-orang di Indonesia mendukung proklamasi kemerdekaan, mereka tidak banyak berteologi. Pada suatu ketika, partai Kristen Indonesia mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa kemerdekaan adalah Anugerah Allah bagi rakyat Indonesia. Tetapi secara keseluruhan, gereja-gereja memandang tidak perlulah mengembangkan suatu alasan teologis bagi dukungan mereka terhadap perjuangan kemerdekaan.”⁷

Latar belakang yang mengakibatkan lahirnya sikap ‘tidak perlu’ itu sangat jelas disebabkan gereja-gereja yang sangat buta terhadap teologi politik. Keberadaan Gereja bahkan sangat *steril* terhadap realitas dan perkembangan sosial. Konsepsi teokrasi hanya dijadikan sebagai pembahasan spiritual dalam arti cukup dihayati dalam bentuk-bentuk *ritus* di kebaktian-kebaktian di Gereja. Memang sangat ironis, sebab mereka masih menggemakan kidung pujiannya dengan sukacita, sementara di halaman depannya sedang berlangsung arak-arakan penderitaan dan ketidakadilan.⁸ Seharusnya orang-orang yang berada didalam Gereja tidak hanya fokus kepada kegiatan spiritual, lebih dari pada itu mereka harus melakukan sesuatu ketika ada penderitaan dan ketidakadilan yang terjadi. Masyarakat Kristen harus berperan dalam mengisi kemerdekaan, perjuangan untuk menolong sesama manusia melalui jalur politik seharusnya menjadi hal wajar dibicarakan di komunitas jemaah Gereja. Sehingga tidak anti terhadap politik dan berani membangun bangsa melalui politik.

Alasan dan peristiwa yang terjadi di awal kemerdekaan tersebut, menjadi salah satu dari beberapa alasan berdirinya Partai Damai Sejahtera di era

⁷ T.B Simatupang, *Kehadiran Kristen dalam Perang, Revolusi, dan Pembangunan*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1987, hlm. 10.

⁸ Saut Sirait, *Politik Kristen di Indonesia*, Jakarta: Gunung Mulia, 2000, hlm. 211.

Reformasi. Partai Damai Sejahtera merupakan partai nasional yang berbasis pada nilai-nilai luhur Kristen. Partai Damai Sejahtera muncul setelah melalui serangkaian perenungan dan penelaahan atas berbagai peristiwa dan tragedi yang mengancam eksistensi manusia seperti peristiwa kerusuhan, pengrusakan, pembakaran gedung dan tempat ibadah serta berbagai pelanggaran HAM, dimana masyarakat kecil menjadi sasaran orang yang tidak bertanggungjawab dan tidak bermoral, telah memunculkan keprihatinan semua orang yang cinta damai.⁹ Partai yang muncul karena rumusan anak-anak muda ini cukup membuat kejutan di dunia politik Indonesia. Partai yang berdiri pada tahun 2001 ini termasuk dalam partai yang tidak diperhitungkan pada Pemilu 2004, namun mampu membuat gebrakan dengan menempatkan wakil-wakilnya di Parlemen.

Ketertarikan penulis terhadap Partai Damai Sejahtera adalah penulis melihat keberhasilan partai ini meraih suara pada pemilu 2004 cukup signifikan. Berbeda dengan partai berbasis Kristiani pada pemilu 1999 yang tidak cukup banyak meraih suara. Perbedaan inilah yang kemudian membuat penulis meneliti tentang keberadaan Partai Damai Sejahtera, pertanyaannya strategi apa yang membuat partai ini berhasil pada pemilu 2004? Penulis juga tertarik dengan hasil yang dicapai pada pemilu 2004, keberhasilan partai menempatkan wakil-wakilnya dan kiprahnya di parlemen menarik untuk dikaji. Berdasarkan latar belakang dan kalimat diatas penulis tertarik mengkaji eksistensi Partai Damai Sejahtera pada pemilu 2004 dan keberadaannya di parlemen.

⁹ Ida Chyntia S dan Dedi Alfiandri, *PDS Bagi Bangsa: Jawaban Atas Berbagai Pertanyaan*, Jakarta: Global Cerdas Media, 2008, hlm. 3.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa pokok masalah yang akan dikaji oleh penulis, yaitu :

1. Bagaimana proses berdirinya Partai Damai Sejahtera?
2. Bagaimana strategi kemenangan Partai Damai Sejahtera dalam Pemilu 2004?
3. Bagaimana eksistensi Partai Damai Sejahtera di DPR-RI pasca Pemilu 2004?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum
 - a. Melatih dan mengembangkan daya pikir kritis, sistematis, dan analitis dalam mengkaji suatu peristiwa sejarah.
 - b. Melatih penulis dalam menyusun sebuah karya sejarah dalam rangka mempraktekkan metodologi penelitian sejarah, sehingga dapat memperoleh wawasan kesejarahan dan menghasilkan karya sejarah yang baik.
 - c. Mengembangkan daya analisis suatu peristiwa sejarah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai calon pendidik.
2. Tujuan Khusus
 - a. Mengetahui lahir dan berdirinya Partai Damai Sejahtera.
 - b. Mengetahui strategi Partai Damai Sejahtera dalam menghadapi Pemilu 2004.
 - c. Mengetahui eksistensi Partai Damai Sejahtera di Parlemen khususnya DPR-RI.

D. Manfaat Penulisan

1. Bagi Penulis

- a. Penulis menggunakan penelitian ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta.
- b. Penelitian ini sebagai tolok ukur atau alat evaluasi untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam merekonstruksi peristiwa sejarah dalam bentuk karya tulis.
- c. Penulis memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang peristiwa yang terjadi di dunia perpolitikan Indonesia khususnya Partai Damai Sejahtera.

2. Bagi Pembaca

- a. Setelah membaca karya ini pembaca diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai eksistensi Partai Damai Sejahtera di dunia politik Indonesia.
- b. Pembaca diharapkan dapat memberikan penilaian kritis dan analisis terhadap tulisan ini.
- c. Dengan membaca karya ini, pembaca diharapkan tertarik akan tema-tema Sejarah Politik di Indonesia.

E. Kajian Pustaka

Istilah partai secara Etimologi berasal dari bahasa latin, yang bermakna membagi, dalam bahasa inggris mengandung makna “*pari*” atau bagian. Kalau

dalam bahasa Perancis tumbuh menjadi “*partager*” yang artinya berbagi.¹⁰ Jadi, makna dasar istilah partai politik ialah bagian, yaitu salah satu bagian dari bagian-bagian yang lainnya atau keseluruhan. Pengertian dasar istilah partai ini sebenarnya adalah salah satu esensi partai politik, bahwa partai politik hanyalah salah satu bagian dari partai-partai politik yang lainnya serta unit-unit politik lainnya dalam suatu entitas sistem politik.

Miriam Budiardjo mendefinisikan partai politik sebagai suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu, melaksanakan kebijakan mereka.¹¹ Definisi ini mensyaratkan bahwa suatu partai politik harus memiliki basis ideologi yang sama, yaitu seperangkat tata nilai atau orientasi yang sama.

Definisi Miriam Budiardjo yang menempatkan pentingnya unsur ideologi dimasukkan dalam definisi partai politik juga diikuti oleh Ramlan Surbakti:

“Partai politik merupakan kelompok anggota yang terorganisir secara rapih dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan yang mereka susun. Alternatif kebijakan umum yang disusun ini merupakan hasil pemaduan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan cara mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan kebijakan umum dapat melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah.”¹²

¹⁰ Bambang Cipto, *Prospek dan Tantangan Partai Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, Hlm. 1-2.

¹¹ Miriam Budiardjo, *Partai Dan Partai Politik*, Jakarta: Yayasan Obor. 1998, hlm. 46.

¹² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka. 2002, hlm. 8.

Begitupun juga dengan definisi yang dikemukakan oleh Mark N. Hagopian, menurutnya partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan.¹³

Berbagai definisi para pakar ilmu politik diatas, penulis menarik sebuah definisi partai politik yang akan dijadikan acuan nantinya dalam studi ini, yaitu sebagai institusi yang terdiri dari kelompok manusia yang memiliki basis ideologis atau orientasi yang sama, terorganisir dan bertujuan mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan dengan menempatkan kandidat - kandidat dalam posisi pemerintahan guna melaksanakan alternatif kebijakan yang mereka susun.

Partai Damai Sejahtera merupakan partai yang memiliki basis ideologi dan orientasi yang sama dengan konstituennya. Dalam buku partai salib demi kebangsaan disebutkan bahwa partai ini memiliki ideologi nasionalis religius dan konstituennya adalah kaum nasrani. Partai ini didirikan setelah melalui serangkaian perenungan dan penelaahan atas berbagai peristiwa dan tragedi yang mengancam *eksistensi* manusia, dimana masyarakat kecil menjadi sasaran orang yang tidak bertanggungjawab dan tidak bermoral. Keprihatinan inilah yang mengawali kegalauan sekaligus kepedulian oleh sekelompok anak muda yang

¹³ Dahlan Ichlasul Amal, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996, hlm. 15.

tergabung dalam JALA (Jaringan Pelayanan Alumni) Universitas Sam Ratulangi di Jakarta dan JYF (Jakarta Youth Fellowship) yang juga di Jakarta.¹⁴

Berdiri pada tanggal 1 Oktober 2001 dihadapan Notaris Elisa Asmawel, S.H dan dideklarasikan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2001. Partai ini yang kemudian akan berjuang menjadi Organisasi Peserta Pemilu, dan perjuangan berikutnya menghantar kadernya untuk dicalonkan sebagai Presiden, Wakil Presiden dan calon-calon legislatif dalam sistem pemilihan Umum yang diadakan secara langsung pada tahun 2004. Sebagai partai yang baru lahir, Partai Damai Sejahtera harus melewati proses panjang dan melelahkan untuk dapat pengesahan sebagai partai yang berbadan hukum. Pengesahan ini bagian dari persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Partai Politik (UU Parpol) nomor: 31 Tahun 2002. Pada 6 Desember 2003 PDS dinyatakan lulus sebagai OPP (Organisasi Peserta Pemilu).

Lolos menjadi partai peserta Pemilu 2004 tidak cukup memuaskan bagi Partai Damai Sejahtera, karena masih ada beberapa tahap lagi untuk dapat memperoleh kursi di DPR-RI. Salah satunya adalah dengan membentuk basis massa pemilih. Membentuk basis massa pemilih membutuhkan strategi-strategi yang tepat sasaran. Buku PDS Bagi Bangsa: Jawaban atas berbagai pertanyaan, menjelaskan tentang sosialisasi apa itu PDS dan apa yang diperjuangkan PDS. Sosialisasi yang dilakukan oleh PDS juga melalui pendekatan tokoh. Tokoh masyarakat dan agama menjadi target PDS, harapannya jika tokoh tersebut setuju dan mendukung perjuangan PDS maka tokoh tersebut akan ikut menyuarakan

¹⁴ Magit Les Denny Tewu dan Paul K, Soma Linggi, *Partai Salib Demi Kebangsaan*, Jakarta: Gramedia, 2007, hlm. 26.

tentang PDS kepada rakyat atau jamaahnya.¹⁵ Hasil pemilu 2004 menunjukkan PDS berhasil meraih 2,13% suara dan berhasil menempatkan 13 wakilnya di parlemen. Semua yang dicapai partai ini tidak terlepas dari semangat visi misi yang dibawakan pada pemilihan umum, dan ternyata hal tersebut sangat efektif untuk merebut simpati masyarakat pemilih, terutama bagi yang beragama Kristiani terbukti dengan hasil yang dicapai pada pemilu 2004.

Keberpihakan masyarakat terhadap visi misi dan program yang dibawakan Partai Damai Sejahtera ini adalah sesuatu yang menarik. Partisipasi yang diberikan masyarakat terhadap Partai Damai Sejahtera ini juga tidak terlepas dari strategi yang dilakukan sebagai partai politik yang berbasiskan kaum Kristiani. Dalam hal ini strategi yang mereka terapkan adalah strategi dalam pemilu, karena pada pemilihan umum 2004 para pemilih Partai Damai Sejahtera ini adalah bukan sebagai massa mangambang, melainkan mereka yang cenderung sudah mengenal akan apa apa program yang dibawakan dan apa *platform* dari mereka sendiri. Dalam arti bahwa ada karakteristik sendiri dalam PDS dimana hal tersebut yang membuat masyarakat dapat menjadi basis massa pemilih mereka.¹⁶

Menjadi berbeda dalam pandangan tentang kebangsaan dan politik pastilah bukan situasi yang menyenangkan, apalagi jika itu dilakukan dalam gedung Parlemen RI. Pilihan ini dijalani oleh Fraksi Partai Damai Sejahtera demi konstituennya, demi Komitmen Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka

¹⁵ Ida Chyntia S dan Dedi Alfiandri, *PDS Bagi Bangsa: Jawaban Atas Berbagai Pertanyaan*, Jakarta: Global Cerdas Media, 2008, hlm. 34.

¹⁶ Bambang Setiawan dan Bestian Nainggolan, *Partai-Partai Politik di Indonesia, Ideologi, dan Program 2004-2009*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2004, hlm. 360.

Tunggal Ika, NKRI) yang diemban, serta rakyat yang telah mempercayakan suaranya untuk disuarakan meski pelan, tetapi tetap harus terdengar. Buku Rekam Jejak Fraksi PDS di Parlemen (2004-2009) menuliskan beberapa penolakan fraksi terhadap RUU yang sifatnya mengedepankan golongan tertentu, ini dibuktikan dengan penolakan atas disahkannya RUU Perbankan Syariah dan Surat Berharga Syariah Negara, RUU Pornografi, dan SKB 3 Menteri terkait berdirinya tempat ibadah.¹⁷

Berbagai pengalaman suka duka memperjuangkan berbagai kebijakan dan kepentingan rakyat melalui Partai Damai Sejahtera dari dalam Gedung Parlemen merupakan warna tersendiri sebagai bagian dari kiprah politisi di parlemen. Misalnya bagaimana proses merubah SKB 3 Menteri yang telah diperjuangkan selama 30 tahun lebih oleh berbagai elemen kristiani akhirnya dengan demo secara damai oleh Fraksi Partai Damai Sejahtera dari dalam Gedung Parlemen SKB tersebut dirubah Pemerintah menjadi Peraturan Bersama (Perber) Mendagri dan Menteri Agama, walaupun hasilnya belum optimal namun Fraksi Partai Damai Sejahtera mewakili aspirasi masyarakat minor.

Apa yang dilakukan anggota Fraksi Partai Damai Sejahtera bagi sebagian orang bisa jadi belum bermakna, tetapi sekalipun demikian bagi Fraksi Partai Damai Sejahtera apa yang sudah dikerjakannya adalah sebuah pembelajaran membangun bangsa dengan nilai-nilai kasih yang berpegang teguh kepada Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jerih lelah yang dilakukan bisa jadi kurang dapat

¹⁷ Ida Chyntia S, *Rekam Jejak Fraksi PDS di Parlemen (2004-2009)*, Jakarta: Global Cerdas Media, 2009, hlm. 23.

diapresiasi oleh masyarakat karena mereka hanya melihat tampilan luar saja. Tetapi sesungguhnya para anggota Fraksi Partai Damai Sejahtera telah menguras pikiran dan tenaga agar rakyat Indonesia dapat menikmati kedamaian, keadilan dan kesejahteraan.¹⁸ Perjuangan Fraksi terhadap RUU Perbankan Syariah, RUU SBSN, dan RUU Pornografi patut diapresiasi walau penolakan tersebut tidak merubah keputusan untuk RUU tersebut disahkan menjadi Undang-undang.

F. Historiografi yang Relevan

Historiografi yang relevan merupakan kajian-kajian historis yang mendahului penelitian dengan tema atau topik yang hampir sama. Hal ini berfungsi sebagai pembeda penelitian, sekaligus sebagai bentuk penunjukan orisinalitas tiap-tiap peneliti.¹⁹ Historiografi merupakan rekonstruksi peristiwa masa lampau melalui tahap pengujian dan analisis terhadap rekaman dan sumber-sumber sejarah.²⁰

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis menemukan beberapa historiografi yang relevan dengan skripsi ini. *Pertama*, Skripsi karya Herry Supriyadi yang berjudul *Sistem Kaderisasi Partai Politik Berbasis Agama (Studi Komparatif Partai Keadilan Sejahter (PKS) Dan Partai Damai Sejahtera (PDS) Sebagai Representasi Partai Agama)* tahun 2009 dari jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu

¹⁸ Dikutip dari Sambutan Ketua DPR-RI , H. Marzuki Ali Untuk Buku “*Rekam Jejak Fraksi Partai Damai Sejahtera di Parlemen (2004-2009)*” Jakarta, 26 Oktober 2009, hlm. vii.

¹⁹ Jurusan Pendidikan Sejarah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi*, Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah FISE UNY, 2006, hlm. 3.

²⁰ Louis Gottschalk, “Understanding History”, a.b. Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press, 2006, hlm. 39.

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Skripsi ini membahas sistem kaderisasi internal partai dan perkembangannya. Perbedaan skripsi ini dengan apa yang ditulis penulis terletak pada pembahasannya yaitu penulis menekankan pada perkembangan partai dalam keikutsertaannya pada pemilu dan kiprah di parlemen.

Kedua, skripsi karya M. Imaduddin Nasution yang berjudul *Partisipasi Politik Umat Kristen Indonesia: Studi Kasus Partai Damai Sejahtera* tahun 2010 dari jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Skripsi ini membahas tentang partisipasi umat Kristen dalam politik. Letak perbedaan dengan karya penulis terdapat dalam pembahasan. Skripsi ini membahas tentang partisipasi umat Kristen, sedangkan penulis membahas tentang perkembangan partai dan kiprah di parlemen.

G. Metode Penelitian

Sejarah merupakan suatu ilmu yang mempunyai metode tersendiri di dalam merekonstruksi peristiwa masa lalu agar menjadikan sebuah karya sejarah yang ilmiah, kritis, dan objektif. Metode sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu *Methodos*²¹ yang berarti cara, sehingga metode itu terkait dengan suatu prosedur, proses, atau teknik yang sistematis dalam penyelidikan suatu disiplin ilmu tertentu untuk mendapatkan objek yang diteliti.²² Menurut Kuntowijoyo, metode sejarah ialah pelaksanaan petunjuk teknis tentang bahan, kritik, interpretasi, dan penyajian

²¹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang, 2005, hlm. 64.

²² Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2007, hlm. 13.

sejarah.²³ Kesimpulannya bahwa metode sejarah adalah alat bantu sejarawan dalam bentuk prinsip dan aturan mengenai prosedur kerja. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan lima tahap penelitian menurut Kuntowijoyo untuk merekonstruksi suatu peristiwa sejarah. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pemilihan Topik

Pemilihan topik merupakan langkah awal dalam suatu penelitian agar dapat menentukan permasalahan yang akan dikaji. Topik dalam sebuah penelitian harus dipilih berdasarkan kedekatan intelektual dan kedekatan emosional.²⁴ Hal ini sangat diperlukan agar dapat mempermudah dalam proses penelitian dan dapat mendalami masalah yang sedang dikaji oleh peneliti. Topik yang dipilih oleh penulis adalah tentang Partai Damai Sejahtera, partai ini merupakan sebuah partai baru di era reformasi tetapi berhasil meraih 13 Kursi DPR-RI di awal keikutsertaannya pada pemilu legislatif tahun 2004, sehingga membuat ketertarikan penulis untuk menulis tentang Partai Damai Sejahtera.

b. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Heuristik berasal dari kata *Heuriskein* dalam bahasa Yunani yang berarti menemukan, sehingga tahap heuristik adalah kegiatan sejarawan untuk

²³ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003, hlm. xix.

²⁴ Kuntowijoyo, 2005, *op.cit*, hlm. 91.

mengumpulkan sumber, jejak-jejak sejarah yang diperlukan.²⁵ Sumber sejarah menurut bahannya dibagi menjadi dua yaitu sumber tertulis dan sumber tidak tertulis. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sumber tertulis dan tidak tertulis. Penulis harus mengumpulkan sumber tertulis sebanyak-banyaknya dan sumber tidak tertulis secukupnya yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya menurut sifatnya, sumber sejarah dibagi menjadi dua yaitu, sumber primer dan sumber sekunder.

1) Sumber Primer

Sumber Primer adalah kesaksian dari seorang saksi dengan panca indra yang lain atau alat mekanis seperti diktafon, yaitu orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakannya yang selanjutnya disebut sebagai saksi mata.²⁶ Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sumber lisan dan buku sebagai sumber primer, sumber lisan ini dilakukan dengan cara wawancara untuk menggali fakta sejarah. Sumber primer tersebut adalah:

1. L. H Simanjuntak, Usia 74 tahun, Ketua DPW DIY 2003-2008.
2. Siswo Wardoyo, Usia 42 tahun, Sekertaris DPW DIY 2003-2006
3. Pdt. Paulus Sentot, S.Th, Usia 44 tahun, Ketua DPC Sleman 2002-2007
4. Pdt. D Wulur, S.Th, Usia 45 tahun, Ketua DPC Purbalingga 2003-2008
5. Budi Sugiarto, S.Th, Usia 63 tahun, Ketua DPC Banyumas 2003-2008
6. Cornelis Kailas, Usia 50 tahun, Ketua DPC Kota Yogyakarta 2002-2007

²⁵ Sardiman AM., *Memahami Sejarah*, Yogyakarta: FIS UNY dan Bigraf Publishing, 2004, hlm. 101-102.

²⁶ Louis Gottschalk., *Loc.cit.*

7. Albert Yusuf Langke, 54 tahun, Caleg DPRD Yogyakarta 2004
8. Paul K Somalinggi dan Denny Tewu. (2007). *Partai Salib Demi Kebangsaan*. Jakarta: Gramedia
9. Ida Chyntia S. (2009). *Rekam Jejak Fraksi di Parlemen (2004-2009)*. Jakarta: Global Cerdas Media
10. Ida Chyntia S dan Dendy Alfriandri. (2008). *PDS Bagi Bangsa: Jawaban Atas Berbagai Pertanyaan*. Jakarta: Global Cerdas Media.

2) Sumber Sekunder

Sumber Sekunder adalah kesaksian dari seseorang yang tidak hadir dalam peristiwa yang dikisahkan. Sumber sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah melalui kajian pustaka yang berasal dari buku-buku, karya ilmiah sarjana lain dan beberapa sejarawan atau peneliti yang mengadakan pembahasan terhadap masalah yang sama atau mempunyai kedekatan yang sama.

Penyusunan skripsi yang berjudul Eksistensi Partai Damai Sejahtera Pada Pemilu 2004, penulis mengumpulkan berbagai sumber berupa buku yang ada di perpustakaan, diantaranya Perpustakaan Kolese Santo Ignatius Kota Baru, Perpustakaan UNY, Perpustakaan FISE UNY, Perpustakaan Laboratorium Sejarah UNY, Perpustakaan Daerah Yogyakarta. Penulis juga mendapatkan berbagai macam artikel dan berita-berita dari internet yang relevan dengan judul skripsi ini juga penulis dapatkan dari internet. Adapun sumber sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bambang Setiawan dan Bestian Nainggolan. (2004). *Partai-Partai Politik di Indonesia, Ideologi, dan Program 2004-2009*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas
2. Castles, Lance. (2004). *Pemilu 2004 dalam Konteks Komparatif dan Historis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
3. Didik Supriyanto,dkk. (2006). *Merancang Sistem Politik Demokratis Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif*. Jakarta: Kemitraan
4. Kholid O Santosa, Chaerul Salam. 2004. *Menuju Presiden RI 2004 Pertarungan Strategi, Koalisi dan Kompromi*. Bandung: Segi Arsy.

c. Verifikasi (Kritik Sumber)

Setelah memperoleh sumber-sumber yang akan digunakan dalam penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kritik sumber. Kritik sumber ada dua macam, yaitu: kritik *ekstern* dan kritik *intern*.

1) Kritik ekstern

Kritik ekstern ialah cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah.²⁷ Kritik ekstern mempunyai tugas menjawab tiga pertanyaan, yaitu relevan atau tidaknya, asli atau tidaknya, dan utuh atau tidaknya sebuah sumber. Cara-cara yang dilakukan oleh penulis untuk membuktikan keaslian sumber yang penulis peroleh berupa dokumen atau arsip yaitu dengan cara melihat dan meneliti kertasnya, tintanya, gaya tulisannya, bahasanya, kalimatnya, hurufnya serta semua penampilan luar untuk mengetahui autentitasnya. Penulis juga

²⁷ Helius Sjamsudin, *op.cit.*, hlm. 132.

melakukan kritik ekstern terhadap sumber lisan dengan mempertimbangkan narasumber yang diwawancarai.

2) Kritik Intern

Kritik Intern merupakan berhubungan dengan kredibilitas sumber atau sumber-sumber yang dapat dipertanggung jawabkan. Kritik intern pun bertujuan untuk menyelidiki aspek intern sebuah sumber. Aspek yang dimaksud berhubungan dengan apakah sebuah sumber sejarah dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis. Penulis pun ditantang untuk dapat mencari tahu apakah kesaksian dan dokumen yang didapat oleh penulis dapat dipercaya.

Tahapan verifikasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber yang didapat. Apabila ditemukan sumber yang tingkat subjektivitasnya sangat tinggi, penulis akan mencari penguat dari sumber-sumber lain yang lebih objektif sehingga didapat data yang lebih akurat. Sumber-sumber yang tingkat subjektifitasnya sangat tinggi dapat digunakan dengan memilih fakta yang kredibel untuk penelitian.

Proses verifikasi yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang diperoleh dari tahap heuristik diharapkan akan mendapatkan fakta sejarah.²⁸ Fakta sejarah yang diperoleh merupakan kepingan-kepingan dari peristiwa sejarah yang siap untuk direkonstruksi menjadi kisah sejarah yang menarik dan mendidik bagi pembaca. Fakta sejarah merupakan bagian yang penting dalam penulisan karya sejarah.

²⁸ Sardiman AM., *op.cit.* hlm. 101-102.

d. Interpretasi

Interpretasi yaitu penafsiran fakta-fakta sejarah yang dikembangkan menjadi kesatuan yang utuh dan bermakna logis. Dalam tahap ini penulis dituntut untuk mencermati dan mengungkapkan data-data yang diperoleh. Oleh sebab itu di dalam interpretasi perlu dilakukan analisis sumber untuk mengurangi unsur subyektifitas dalam kajian sejarah. Subyektifitas sejarawan memang diakui, tetapi harus dihindari.²⁹

e. Historiografi

Historiografi merupakan kegiatan penyajian berupa rekonstruksi dari fakta-fakta sejarah yang ada menjadi satu kesatuan yang kronologis dan objektif dalam bentuk karya ilmiah. Hasil dari historiografi ini adalah skripsi yang berjudul “ Eksistensi Partai Damai Sejahtera Pada Pemilu dan Parlemen (2004-2008)”. Kelemahan penulisan ini hanya menggunakan sumber dari internal partai, karena penulis kesulitan menemukan sumber pembandingan dan terbatasnya waktu penelitian.

H. Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan antar lain pendekatan politik, ekonomi, sosiologi, dan agama. Pendekatan politik adalah pendekatan yang menyoroti struktur kekuasaan, jenis kepemimpinan, hierarki sosial, pertentangan kekuasaan, dan lain sebagainya.³⁰ Pendekatan politik sangat

²⁹ Kuntowijoyo, 2005, *op.cit.*, hlm. 101

³⁰ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia, 1993, hlm. 4.

diperlukan untuk menganalisis kondisi Partai Damai Sejahtera dari berdirinya sampai keikutsertaan dalam pemilihan umum.

Pendekatan ekonomi adalah pendekatan merujuk pada pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan lain sebagainya yang berharga dan dapat diartikan sebagai tata kehidupan perekonomian negara.³¹ Pendekatan ini sangat diperlukan untuk menganalisis kebijakan Partai dalam mengatur keuangan untuk tetap Eksis sebagai partai politik peserta Pemilu.

Penggunaan pendekatan sosiologi dalam kajian sejarah, sebagaimana dijelaskan oleh Weber, adalah bertujuan memahami arti subyektif dari perilaku sosial, bukan semata-mata menyelidiki arti objektifnya. Tampak bahwa fungsionalisasi sosiologi mengarah pengkaji sejarah kepada pencarian arti yang dituju oleh tindakan individual berkenaan dengan peristiwa-peristiwa kolektif, sehingga pengetahuan teoritislah yang akan mampu membimbing sejarawan dalam menemukan motif-motif dari suatu tindakan atau faktor-faktor dari suatu peristiwa.³² Pendekatan sosiologi ini sangat diperlukan untuk mengkaji keadaan sosial masyarakat didalam keanggotaan partai yang terdiri dari politisi dan pengurus partai maupun masyarakat pemilih.

Pendekatan agama merupakan suatu refleksi kritis dan sistematis yang dilakukan oleh penganut agama terhadap agamanya. Dalam skripsi ini pendekatan agama sangat diperlukan hal ini karena skripsi ini mengambil tema Partai Damai Sejahtera dimana partai ini mempunyai basis pemilih dari agama Kristen.

³¹ *Ibid*

³² Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, hlm. 11.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi yang berjudul “*Eksistensi Partai Damai Sejahtera Pada Pemilu dan Parlemen (2004-2008)*” terdiri dari lima bab dan berguna untuk memperoleh gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai isi dari skripsi tersebut. Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, historiografi yang relevan, metode penelitian, pendekatan penelitian, serta sistematika pembahasan dari skripsi ini. Pendahuluan berfungsi untuk mengerti topik apa yang akan dikaji, alasan penulis mengkaji topik tersebut dan bagaimana penulis akan meneliti sebuah topik yang sudah ditetapkan untuk diteliti.

BAB II. LAHIR DAN BERDIRINYA PARTAI DAMAI SEJAHTERA

Bab ini membahas tentang proses lahirnya Partai Damai Sejahtera yaitu bagaimana proses terbentuk, alasan-alasan yang mendasar kenapa partai ini harus berdiri, pengesahan secara hukum, membentuk organisasi sayap. Bab ini juga membahas perkembangan partai dalam membentuk DPC, DPW, dan pengurus-pengurus di daerah sampai berhasil lolos untuk ikut serta dalam Pemilihan Umum tahun 2004.

BAB III. PARTAI DAMAI SEJAHTERA PADA PEMILU 2004

Bab ini akan membahas mengenai format pemilu 2004 karena format pemilu ini berbeda dari pemilu sebelumnya. Membahas strategi-strategi partai dalam usaha meraih suara, dari proses berlangsungnya pemilihan umum legislatif sampai kepada pemilihan presiden. Bab ini membahas pula mengenai keberhasilan partai meraih kursi di DPR-RI.

BAB IV. EKSISTENSI PARTAI DAMAI SEJAHTERA DI DPR-RI

Bab ini membahas tentang terbentuknya fraksi di DPR-RI, terbentuknya Fraksi PDS di Parlemen, dan peranan politisi-politisi Partai Damai Sejahtera di DPR-RI (2004-2009) dalam memperjuangkan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Pembahasan dan penolakan mengenai beberapa RUU serta perjuangan fraksi kepada konstituennya termasuk dalam pembahasan bab ini.

BAB V. KESIMPULAN

Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah yang terdapat dalam bab pendahuluan. Dalam bab ini juga terdapat kelemahan penelitian ini dan apa saja yang bisa diteliti mengenai topik Partai Damai Sejahtera.